

EVALUASI EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Antoni Masril

Antonims1007@gmail.com

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro

Abstract

This study aims to determine and analyze the timeliness of the implementation of the Preparation and Allocation of Regional Expenditures to the Central Lampung Regency Government.

Effectiveness Evaluation of Regional Budget Planning in Central Lampung Regency Government fell 79.6% with very good interpretation of criteria. The assessment consisted of 7 (seven) measurement criteria namely Relevance with an assessment of 81.2% with very good interpretation and needing a little evaluation. Measurement criteria Significance with an assessment of 75.9% with good interpretation and requires little improvement. The measurement criteria for validity with an assessment were 79.7% with good interpretation and there were few suggestions. The measurement criteria for trust with an assessment of 82.1% with very good interpretation and few recommendations. Measurement criteria for objectivity with an assessment of 77.1% with good interpretation and little input. Measurement criteria Timeliness with an assessment of 80% with very good interpretation and slight improvement. Measuring criteria for Usability with 79.4% assessment with good interpretation and slight improvement.

Keywords: evaluation of the APBD preparation stage

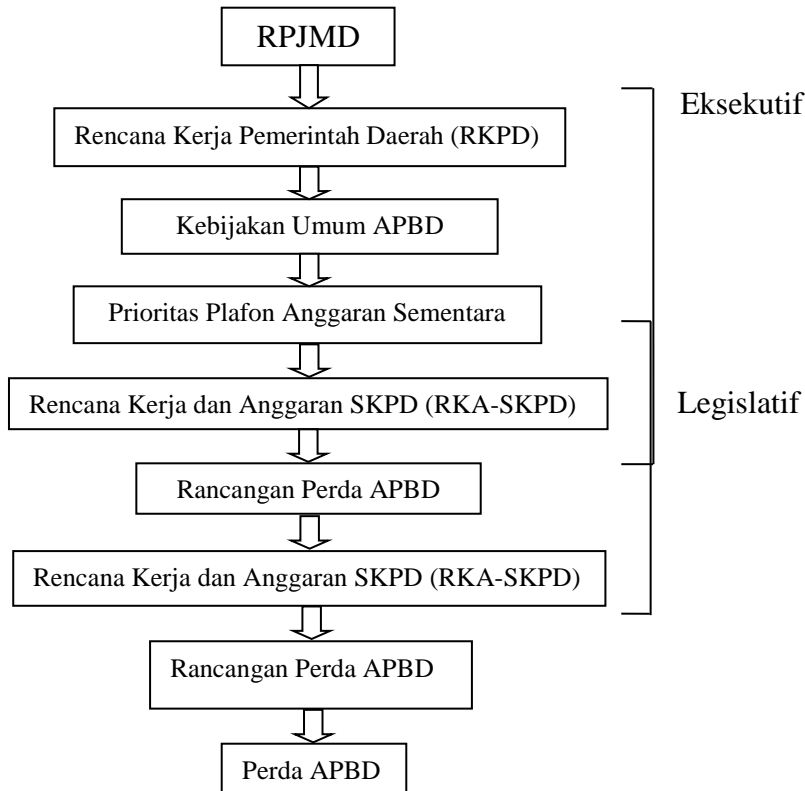
I. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Pasal 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran dan Belanja Negara menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

RAPBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran RAPBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai.

Adapun skema proses penyusunan RAPBD dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Skema Proses Penyusunan RAPBD



Sumber. Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 2018.

Berdasarkan gambar 1 dapat dijelaskan bahwa proses perencanaan dan Penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: (1) RPJMD, (2) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, (3) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, (4) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, (5) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, (6) penyusunan rancangan perda APBD dan (7) penetapan APBD.

Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan

pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

Tabel 1. Capaian Fiskal Perencanaan Anggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

Tahun	RAPBD (M)	APBD Perubahan (M)
2015	1.339,1	1.325,6
2016	1.565,8	1.546,7
2017	1.848,1	1.822,5
Jumlah	4.753,00	4.694,80

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidaktepatan penyusunan perencanaan anggaran daerah, yaitu terjadinya pengurangan jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah ditetapkan selama ini dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2015-2017. Hal ini terjadi karena Kabupaten Lampung Tengah dinilai belum efektif dan efisien dalam melakukan sebuah perencanaan anggaran daerah.

Berdasarkan pra survei yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 November 2018 pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ditemukan beberapa pokok permasalahan yang terjadi, yaitu (a) keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah), (b) Sarana dan prasarana yang tersedia (server) belum sesuai dengan kebutuhan, (c) Masih kurangnya koordinasi antara eksekutif dengan legislatif dalam perencanaan anggaran, (d) Keterbatasan sumber daya manusia pada OPD yang belum memenuhi persyaratan dalam sistem penganggaran.

Tabel 2. Mekanisme Perencanaan Anggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

Proses Perencanaan	Isi / Produk
<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan politik • Proses teknokratik • Partisipatif • Proses top down dan bottom up 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) • RPJP 2005-2025 (RUU) • Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) • RPJM 2016-2021 • Renstra-KL & Restra-SKPD • Rencana kerja pemerintah/daerah (RKP/D) • Renja-KL & Renja-SKPD

Sumber. Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 2018.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam perencanaan anggaran daerah terdapat beberapa proses perencanaan yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian akan menghasilkan beberapa isi/produk dari sebuah perencanaan.

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Perencanaan Anggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 sudah efektif dan efisien?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas

Perencanaan Anggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018.

II. Tinjauan Pustaka

Anggaran merupakan suatu rencana pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan maupun pengeluaran dalam periode tertentu. Menurut Sirait (2006: 1) perencanaan adalah proses pembuatan tujuan organisasi dan memilih tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sedangkan anggaran menurut Afandi dan Tarigan (2016: 95) adalah: Pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut Hastuti (2013: 8) Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Menurut Ahmari dan Amar (2014: 5) Anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurut Arifin dkk (2017: 88) anggaran adalah merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk

mempersiapkan suatu anggaran, yang dipraktikkan dalam organisasi sektor publik sebagai kebijakan politik. Menurut Suyadnya dkk (2014: 2) anggaran adalah suatu gambaran kuantitatif dari tujuan-tujuan manajemen dan sebagai alat memantau kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Kurniawati dkk (2016: 61) penganggaran merupakan salah satu bentuk perencanaan aktivitas perusahaan di masa yang akan datang dengan tujuan kesinambungan perusahaan serta hasil usaha yang diharapkan yaitu berupa laba.

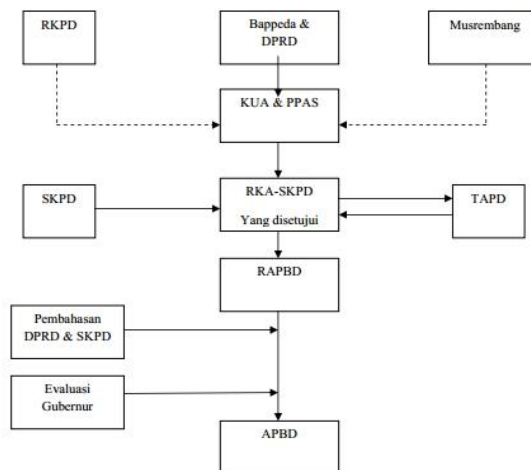
Menurut Suprpti (2015: 206) Penganggaran perusahaan merupakan proses menyusun anggaran perusahaan sehingga anggaran perusahaan berarti menjelaskan, menghitung, dan menyusun anggaran perusahaan.

III. Metodologi

Penelitian ini dilakukan kepada 34 pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian adalah deskriptif dan alat analisis yang digunakan adalah *Internal Control Quisinoare (ICQ)* menggunakan skala nominal (skala likert), analisis dokumen serta identifikasi.

IV. Hasil Penelitian

1. Proses Perencanaan Anggaran Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 1. Proses Penganggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Proses penganggaran dimulai dengan menjangring aspirasi dari masyarakat yang dikenal dengan Musrembang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Proses penganggaran selanjutnya adalah membuat Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang disusun oleh Pemerintah Daerah kemudian dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Setelah penyusunan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selesai dilakukan dan telah terjadi kesepakatan DPRD dengan ditandatanganinya nota kesepakatan. Langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas APBD yang gunanya untuk mengatasi berbagai kendala, tantangan dan masalah yang timbul dan memperlancar pencapaian Kebijakan Umum APBD.

2. Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Penyusunan APBD merupakan rangkaian yang terdiri dari 14 (empat belas) tahap, tahapan tersebut saling berkaitan satu

dengan lainnya. Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan sampai dengan APBD disahkan adalah sebagai berikut.

- Penyusunan RKPD.
- Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah.
- Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
- Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS.
- Penerbitan surat edaran Kepala Daerah dan perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-SKPD serta Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
- Penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD.
- Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang

- Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- j. Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.
 - k. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD.
 - l. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada gubernur.
 - m. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi.
 - n. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gubernur.

1. Penyusunan Indeks (Y)

Tabel 4. Tabulasi Jawaban Responden Penilaian Efektivitas Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Kriteria Jawaban	Total Jawaban Responden	Total Nilai	Rumus Indeks
Sangat Baik Sekali	286	1430	42,1%
Baik Sekali	199	796	23,4%
Cukup Baik	127	381	11,2%
Kurang Baik	46	92	2,7%
Tidak Baik Sekali	6	6	0,2%
Total	664	2705	79,6%

Sumber: olahan data 2017

perhitungan skala likert dari kuesioner para pegawai

$$\begin{aligned}
 Y &= \text{Nilai tertinggi} \\
 &= \text{Bobot nilai tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 20 \times 34 \\
 &= 3400
 \end{aligned}$$

$$\text{Rumus indeks \%} = \frac{2705}{3400} \times 100 = 79,6\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui penyusunan dan pelaksanaan APBD Lampung Tengah telah terlaksana dengan **baik sekali** dengan nilai persentase 79,6%.

2. Nilai Relevansi

Tabel 5. Tabulasi Jawaban Responden Tentang Relevansi

Kriteria Jawaban	Total Jawaban Responden	Total Nilai	Rumus Indeks
Sangat Baik Sekali	76	380	44,7%
Baik Sekali	48	192	22,6%
Cukup Baik	32	96	11,3%
Kurang Baik	10	20	2,4%
Tidak Baik Sekali	2	2	0,2%
Total	168	690	81,2%

Sumber: olahan data 2017

perhitungan skala likert dari kuesioner para pegawai

$$\begin{aligned}
 Y &= \text{Nilai tertinggi} \\
 &= \text{Bobot nilai tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 5 \times 34 \\
 &= 850
 \end{aligned}$$

$$\text{Rumus indeks \%} = \frac{690}{850} \times 100 = 81,2\%$$

Dari hasil jawaban responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa relevansi dalam penyusunan APBD Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan tugasnya dengan **sangat baik sekali**. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah jawaban responden yang menjawab berjumlah 76 jumlah jawaban responden dari 168 jumlah jawaban responden atau 44,7% dari total skor penilaian.

3. Nilai Signifikansi

Tabel 6. Tabulasi Jawaban Responden Tentang Signifikansi

Kriteria Jawaban	Total Jawaban Responden	Total Nilai	Rumus Indeks
Sangat Baik Sekali	24	120	35,3%
Baik Sekali	21	84	24,7%
Cukup Baik	14	42	12,4%
Kurang Baik	5	10	2,9%
Tidak Baik Sekali	2	2	0,6%
Total	66	258	75,9%

Sumber: olahan data 2017

perhitungan skala likert dari kuesioner para pegawai

$$\begin{aligned}
 Y &= \text{Nilai tertinggi} \\
 &= \text{Bobot nilai tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 2 \times 34 \\
 &= 340
 \end{aligned}$$

$$\text{Rumus indeks \%} = \frac{258}{340} \times 100 = 75,9\%$$

Dari hasil jawaban responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa signifikansi dalam penyusunan APBD Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan tugasnya dengan **sangat baik sekali**. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah jawaban responden berjumlah 24 jumlah jawaban responden dari 258 jumlah jawaban responden atau 35,3% dari total skor penilaian.

4. Nilai Validitas

Tabel 7. Tabulasi Jawaban Responden Tentang Validitas

Kriteria Jawaban	Total Jawaban Responden	Total Nilai	Rumus Indeks
Sangat Baik Sekali	28	140	41,2%
Baik Sekali	21	84	24,7%
Cukup Baik	13	39	11,5%
Kurang Baik	4	8	2,4%
Tidak Baik Sekali	0	0	0,0%
Total	66	271	79,7%

Sumber: olahan data 2017

perhitungan skala likert dari kuesioner para pegawai

$$\begin{aligned}
 Y &= \text{Nilai tertinggi} \\
 &= \text{Bobot nilai tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 2 \times 34 \\
 &= 340
 \end{aligned}$$

$$\text{Rumus indeks \%} = \frac{271}{340} \times 100 = 79,7\%$$

Dari hasil jawaban responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa validitas dalam penyusunan APBD Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan tugasnya dengan **sangat baik sekali**. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah jawaban responden yang menjawab berjumlah 28 dari 66 jumlah jawaban responden atau 41,2% dari total skor penilaian.

5. Nilai Kepercayaan

Tabel 8. Tabulasi Jawaban Responden Tentang Kepercayaan

Kriteria Jawaban	Total Jawaban Responden	Total Nilai	Rumus Indeks
Sangat Baik Sekali	33	165	48,5%
Baik Sekali	20	80	23,5%
Cukup Baik	10	30	8,8%
Kurang Baik	2	4	1,2%
Tidak Baik Sekali	0	0	0,0%
Total	65	279	82,1%

Sumber: olahan data 2017

perhitungan skala likert dari kuesioner para pegawai

$$\begin{aligned}
 Y &= \text{Nilai tertinggi} \\
 &= \text{Bobot nilai tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 2 \times 34 \\
 &= 340
 \end{aligned}$$

$$\text{Rumus indeks \%} = \frac{279}{340} \times 100 = 82,1\%$$

Dari hasil jawaban responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dalam penyusunan APBD Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan tugasnya dengan **sangat baik sekali**. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah jawaban responden yang menjawab berjumlah 33 dari 65 jumlah jawaban responden atau 48,5% dari total skor nilai.

6. Nilai Objektivitas

Tabel 9. Tabulasi Jawaban Responden Tentang Objektivitas

Kriteria Jawaban	Total Jawaban Responden	Total Nilai	Rumus Indeks
Sangat Baik Sekali	35	175	34,3%
Baik Sekali	38	152	29,8%
Cukup Baik	17	51	10,0%
Kurang Baik	7	14	2,7%
Tidak Baik Sekali	1	1	0,2%
Total	98	393	77,1%

Sumber: olahan data 2017

perhitungan skala likert dari kuesioner para pegawai

$$Y = \text{Nilai tertinggi}$$

= Bobot nilai tertinggi x jumlah pertanyaan x jumlah responden

$$= 5 \times 3 \times 34$$

$$= 510$$

$$\text{Rumus indeks \%} = \frac{393}{510} \times 100 = 77,1\%$$

Dari hasil jawaban responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa objektivitas dalam penyusunan APBD Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan tugasnya dengan **sangat baik**. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah jawaban responden yang menjawab berjumlah 38 dari 98 jumlah jawaban responden atau 29,8% dari total skor nilai.

7. Nilai Kecepatan Waktu

Tabel 10. Tabulasi Jawaban Responden Tentang Kecepatan Waktu

Kriteria Jawaban	Total Jawaban Responden	Total Nilai	Rumus Indeks
Sangat Baik Sekali	61	305	44,9%
Baik Sekali	35	140	20,6%
Cukup Baik	23	69	10,1%
Kurang Baik	15	30	4,4%
Tidak Baik Sekali	0	0	0,0%
Total	134	544	80,0%

Sumber: olahan data 2017

perhitungan skala likert dari kuesioner para pegawai

$$Y = \text{Nilai tertinggi}$$

= Bobot nilai tertinggi x jumlah pertanyaan x jumlah responden

$$= 5 \times 4 \times 34$$

$$= 680$$

$$\text{Rumus indeks \%} = \frac{544}{680} \times 100 = 80\%$$

Dari hasil jawaban responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan waktu dalam penyusunan APBD Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan tugasnya dengan **sangat baik sekali**. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah responden yang menjawab berjumlah 61 dari 134 jumlah jawaban responden atau 44,9% dari total skor penilaian.

8. Nilai Daya Guna

Tabel 11. Tabulasi Jawaban Responden Tentang Daya Guna

Kriteria Jawaban	Total Jawaban Responden	Total Nilai	Rumus Indeks
Sangat Baik Sekali	29	145	42,6%
Baik Sekali	16	64	18,8%
Cukup Baik	18	54	15,9%
Kurang Baik	3	6	1,8%
Tidak Baik Sekali	1	1	0,3%
Total	67	270	79,4%

Sumber: olahan data 2017

perhitungan skala likert dari kuesioner para pegawai

Y = Nilai tertinggi

= Bobot nilai tertinggi x jumlah

pertanyaan x jumlah responden

= $5 \times 2 \times 34$

= 340

Rumus indeks % = $\frac{270}{340} \times 100 = 79,4\%$

Dari hasil jawaban responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa daya guna dalam penyusunan APBD Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan tugasnya dengan **sangat baik sekali**. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah jawaban responden berjumlah 29 dari 67 jumlah jawaban responden atau 42,6% dari total skor penilaian.

Tabel 12. Ringkasan Hasil Pengolahan Data

No	Indikator	Hasil (%)	Keterangan
1	Relevansi	81,2%	Sangat baik , akan tetapi alangkah baiknya jika lebih mengevaluasi kembali apa yang direncanakan agar tepat sasaran
2	Signifikansi	75,9%	Baik , dengan sedikit perbaikan yaitu dalam melakukan Perencanaan Anggaran Daerah untuk memperhatikan betul dampak-dampak yang akan diakibatkan kedepannya.
3.	Validitas	79,7%	Baik , ada beberapa saran yaitu diharapkan agar mencari informasi perencanaan anggaran dimasa lalu untuk dijadikan acuan perencanaan anggaran dimasa yang akan datang agar yang direncanakan tepat dan benar
4	Kepercayaan	82,1%	Sangat Baik , ada sedikit rekomendasi yaitu agar pegawai lebih mengedepankan kehandalan dan komitmen dalam penyusunan perencanaan anggaran daerah
5	Objektivitas	77,1%	Baik , sedikit masukan yaitu perlu ditingkatkan kembali dalam penyusunan anggaran daerah agar tidak memihak pada satu golongan saja dan harus mengedepankan sikap jujur
6	Ketepatan	80%	Sangat baik , sedikit perbaikan, alangkah

No	Indikator	Hasil (%)	Keterangan
	waktu		baiknya jika pegawai lebih memanfaatkan waktu kerja dengan lebih baik lagi, berdisiplin, sehingga pekerjaan akan selesai tepat pada waktunya
7	Daya guna	79,4%	Sangat baik , sedikit perbaikan yaitu agar pegawai menelaah kembali apakah perencanaan yang dibuat mampu untuk mendatangkan hasil atau manfaat dikemudian hari

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Penilaian Efektivitas Perencanaan Anggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dinilai telah efektif. Hal ini disebabkan karena hasil jawaban responden/pegawai menunjukkan nilai 79,6% dengan kriteria sangat baik. Akan tetapi alangkah baiknya jika mengevaluasi kembali, memperhatikan betul dampak-dampak yang akan diakibatkan kedepannya, mencari informasi perencanaan anggaran dimasa lalu untuk dijadikan acuan perencanaan anggaran dimasa yang akan datang agar yang direncanakan tepat dan benar, mengedepankan komitmen dan kejujuran tentu hal ini akan berdampak pada efektifnya perencanaan anggaran daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

V. Kesimpulan

Evaluasi Efektivitas Perencanaan Anggaran Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah jatuh di angka **79,6%** dengan interpretasi kriteria sangat baik. Penilaian tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kriteria pengukuran yaitu Relevansi dengan penilaian sebesar **81,2%** dengan interpretasi sangat baik dan perlu sedikit evaluasi. Kriteria pengukuran Signifikansi dengan penilaian sebesar **75,9%** dengan interpretasi baik dan perlu sedikit perbaikan. Kriteria pengukuran Validitas

dengan penilaian sebesar **79,7%** dengan interpretasi baik dan ada sedikit saran. Kriteria pengukuran Kepercayaan dengan penilaian sebesar **82,1%** dengan interpretasi sangat baik dan sedikit rekomendasi. Kriteria pengukuran Objektivitas dengan penilaian sebesar **77,1%** dengan interpretasi baik dan sedikit masukan. Kriteria pengukuran Ketepatan waktu dengan penilaian sebesar **80%** dengan interpretasi sangat baik dan sedikit perbaikan. Kriteria pengukuran Daya guna dengan penilaian sebesar **79,4%** dengan interpretasi baik dan sedikit perbaikan.

Daftar Pustaka

- Afandi, Muhamad Nur dan Tarigan, Florentinus Feri Andi. 2016. Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. XIII, h. 93-110.
- Ahmari, Amir dan Amar, Syamsul. 2014. Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengendalian Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Riset Dan Manajemen Bisnis*, Vol.2, h. 1-12.
- Arifin., Nurdin, Djayani dan Yusnita, Nina. 2017. Analisis Proses Perencanaan

- Penganggaran Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali). *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, h. 86-98.
- Hastuti, Nova Asteria. 2013. Peran Akuntansi Sektor Publik Dalam Perencanaan Anggaran Pada Kinerja Keuangan Daerah Kota Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol.2, h. 1-16.
- Kurniawati, Dessi., Jamiyla dan Pratiwi, Trie Sartika. 2016. Analisis Anggaran Penjualan Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Pt Wahana Persada Karton Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol.8 h. 61-66.
- Sirait, T Justine. 2006. *Anggaran Sebagai Alat Bantu Manajemen*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suprapti, Devita Mardiana. 2015. Penerapan Anggaran Penjualan Sebagai Alat Kendali Manajemen Pendapatan Dan Pengembangan Usaha (Studi kasus pada CV. Mustika Surya Elektrik Samarinda). *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol.3. h. 204-216.
- Suwardi. 2012. Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, h. 319-349.
- Suyadnya, Kadek., Meitriana, Made Ary dan Anjuman Zukhri. 2014. Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran dalam Evaluasi Kinerja Perusahaan UD. Agus Kusuma. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, Vol.4, h. 1-10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan 10 Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pasal 5 ayat (1) terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD.